Al Iidara Balad
Jurnal Administrasi Negara
ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

# IMPLEMENTASI PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN PADA BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP) TEBING TINGGI KABUPATEN BALANGAN

**Muhammad Ilham[1], Arpandi [2], Herry Febriadi[3]**
Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai
Email: ilhamjaxs08@gmail.com

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program penyuluhan pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam terhadap 14 informan yang terdiri dari Koordinator BPP, penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani, serta observasi dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman(2014). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian belum optimal pada aspek komunikasi dan sumber daya, namun cukup baik pada aspek disposisi dan struktur birokrasi. Faktor pendukung meliputi komitmen penyuluh, dukungan pemerintah daerah, dan kerja sama kelompok tani. Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, kurangnya sarana prasarana, rendahnya partisipasi petani, dan kondisi geografis. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan jumlah penyuluh, fasilitas pendukung, intensitas komunikasi, dan penerapan metode penyuluhan partisipatif.

**Kata Kunci**: Implementasi Kebijakan, Program Penyuluhan Pertanian, Pemberdayaan Petani, Administrasi Publik

***ABSTRACT***

*This study aims to analyze the implementation of the agricultural extension program at the Agricultural Extension Center (BPP) of Tebing Tinggi, Balangan Regency, and identify the factors influencing it. The research employed a qualitative approach with descriptive type. Data were collected through in-depth interviews with 14 informants consisting of the Head of BPP, agricultural extension officers, heads of farmer groups, and members of farmer groups, as well as observation and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman* (2014)*model. The results show that the implementation of the agricultural extension program is not yet optimal in terms of communication and resources, but quite adequate in terms of disposition and bureaucratic structure. Supporting factors include the commitment of extension officers, support from local government, and cooperation among farmer groups. Inhibiting factors include the limited number of extension officers, lack of supporting infrastructure, low farmer participation, and geographical conditions. This study recommends increasing the number of extension officers, supporting facilities, communication intensity, and implementing participatory extension methods.*

***Keywords****: Policy Implementation, Agricultural Extension Program, Farmer Empowerment, Public Administration*

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

**PENDAHULUAN**

Sektor pertanian merupakan salah satu pilar utama pembangunan nasional di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam penyediaan pangan, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian nasional (Subarsono, 2019). Sebagai negara agraris dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, Indonesia memiliki lahan subur dan iklim tropis yang mendukung kegiatan pertanian sepanjang tahun (Winarno, 2018). Namun demikian, sektor pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan kompleks yang menghambat optimalisasi potensinya. Rendahnya produktivitas akibat keterbatasan akses terhadap teknologi modern, alih fungsi lahan pertanian, perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan keterbatasan akses pasar menjadi tantangan serius yang memerlukan intervensi kebijakan yang terarah dan berkelanjutan (Subarsono, 2019).

Pemerintah Indonesia telah merespons berbagai tantangan tersebut melalui kebijakan dan program strategis di sektor pertanian, termasuk penyediaan subsidi pupuk, pengembangan teknologi pertanian, peningkatan kualitas sumber daya manusia petani, pembangunan infrastruktur pendukung, serta penerapan konsep pertanian berkelanjutan (Winarno, 2018). Upaya-upaya ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan secara lebih optimal (Nugroho, 2021). Dalam kerangka kebijakan tersebut, penyuluhan pertanian memegang peranan sentral sebagai jembatan antara inovasi teknologi dan praktik petani di lapangan (Soetomo, 2019).

Penyuluhan pertanian di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (SP3K). Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan kegiatan penyuluhan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, produktivitas, serta kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha di sektor pertanian (Yoyon, 2022). Sistem penyuluhan melibatkan berbagai kelembagaan baik di tingkat pusat maupun daerah, dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan sebagai ujung tombak pelaksanaan program (Anggara, 2019). Peran penyuluh pertanian sangat strategis karena menjadi penghubung antara pemerintah, lembaga penelitian, dan petani dalam mentransfer inovasi serta teknologi pertanian (Marlinah and Yuliana, 2022).

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap krusial dalam proses kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan. George C. Edward III (2019) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi kebijakan kepada pelaksana dan sasaran kebijakan. Sumber daya meliputi kemampuan sumber daya manusia, fasilitas, dan dukungan lainnya. Disposisi merupakan sikap dan komitmen pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme kerja dan pedoman pelaksanaan kebijakan (Agustino, 2017).

Penelitian terdahulu tentang implementasi program penyuluhan pertanian menunjukkan hasil yang bervariasi. Jariyah (2023) menemukan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara telah berjalan cukup baik, namun masih terdapat kendala dalam partisipasi masyarakat, keterbatasan sarana prasarana, dan koordinasi yang belum optimal. Hidayat (2024) dalam penelitiannya di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan menyimpulkan ahwa implementasi program penyuluhan pertanian belum berjalan optimal, dengan indikasi rendahnya tingkat penerapan hasil penyuluhan oleh petani, kurangnya intensitas kegiatan, dan keterbatasan jumlah penyuluh. Kedua penelitian tersebut memberikan gambaran bahwa

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

implementasi program penyuluhan pertanian di berbagai daerah masih menghadapi tantangan serupa (Jariyah, 2023; Hidayat, 2024).

Berdasarkan pengamatan awal di BPP Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, ditemukan beberapa fenomena yang mengindikasikan belum optimalnya implementasi program penyuluhan pertanian. Pertama, belum optimalnya penyampaian informasi oleh penyuluh pertanian kepada masyarakat tani, sehingga masih terdapat petani yang kurang memahami tujuan, manfaat, serta teknik pertanian yang disosialisasikan (Agustino, 2017). Koordinasi antara penyuluh dengan kelompok tani maupun pemerintah desa terkadang mengalami hambatan, seperti keterlambatan informasi jadwal kegiatan dan kurangnya intensitas sosialisasi. Kedua, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penyuluhan, termasuk alat peraga, media penyuluhan, teknologi informasi, dan transportasi operasional yang menyebabkan proses transfer pengetahuan menjadi kurang efektif (Pasolong, 2019).

Ketiga, masih rendahnya pemahaman penyuluh pertanian terhadap substansi kebijakan program penyuluhan yang menyebabkan pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sebagian penyuluh masih menjalankan kegiatan secara rutinitas tanpa mengacu pada tujuan strategis program, dengan pendekatan yang masih bersifat satu arah (*top-down*) (Agustino, 2017). Keempat, struktur organisasi yang kurang jelas dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal turut mempengaruhi pelaksanaan program, dengan adanya tumpang tindih tugas, prosedur administrasi yang berbelit-belit, dan pembagian tugas yang belum jelas. Fenomena-fenomena ini menunjukkan urgensi penelitian untuk mengevaluasi implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti empiris (III, 2019).

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam fenomena implementasi program penyuluhan pertanian dalam konteks alamiahnya, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan dan analisis data (Sugiyono, 2019). Tipe penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan secara komprehensif implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi Kabupaten Balangan berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edward III (2019): komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Lokasi penelitian adalah Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tebing Tinggi Kabupaten Balangan yang beralamat di Jalan Rambung Raya, Desa Tebing Tinggi, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa BPP Tebing Tinggi merupakan pusat kegiatan penyuluhan pertanian di wilayah tersebut dan menghadapi berbagai tantangan implementasi program yang relevan untuk diteliti. Penelitian dilaksanakan pada periode Mei-Juni 2026.

Sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara purposive sampling. Pertimbangan pemilihan informan adalah mereka yang dianggap paling mengetahui tentang implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi (Sugiyono, 2019). Informan berjumlah 14 orang yang terdiri dari Koordinator BPP, penyuluh pertanian lapangan, ketua kelompok tani, dan anggota kelompok tani. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

kantor, laporan kegiatan, struktur organisasi, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan objek penelitian (Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan, 2025).

Teknik pengumpulan data menggunakan tiga metode: wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan dokumentasi (Sugiyono, 2019). Wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan mengembangkan pertanyaan berdasarkan indikator implementasi kebijakan namun tetap fleksibel mengikuti respons informan. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses penyuluhan di lokasi penelitian, memperhatikan aspek-aspek seperti perilaku petugas, sarana dan prasarana, serta interaksi antara petugas dan masyarakat. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang mendukung hasil wawancara dan observasi.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (2014) yang terdiri dari tiga tahap: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Kondensasi data dilakukan dengan menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data yang relevan dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi, tabel tematik, dan kutipan langsung dari hasil wawancara. Penarikan kesimpulan dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian dengan memverifikasi temuan melalui perbandingan data antar-informan dan hasil observasi lapangan (Miles, Huberman and Saldaña, 2014).

Uji kredibilitas data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi sumber dan teknik, diskusi dengan sejawat, analisis kasus negatif, dan member check (Sugiyono, 2019). Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan melakukan pengumpulan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi temuan.

## PEMBAHASAN

### Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di BPP Tebing Tinggi Kabupaten Balangan

#### 1. Komunikasi

a. Kesesuaian Informasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesesuaian informasi antara penyuluh dan petani di BPP Tebing Tinggi telah berjalan cukup baik melalui pertemuan rutin dan kunjungan lapangan. Temuan mengungkapkan bahwa sebagian besar petani menerima informasi mengenai program pertanian, namun pemahaman mereka terhadap materi masih bervariasi. Penelitian juga menemukan bahwa masih terdapat kendala seperti ketidakhadiran anggota kelompok tani yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan secara merata. Penyuluh telah berupaya menyampaikan informasi terkait teknis budidaya, penggunaan pupuk, dan pengendalian hama sesuai arahan program. Koordinasi antara penyuluh dan ketua kelompok tani berjalan aktif untuk mempercepat distribusi informasi baru, namun faktor kesibukan petani di sawah menjadi penghambat utama dalam penerimaan informasi yang konsisten .

Kurang optimalnya kesesuaian informasi berdampak pada rendahnya adopsi teknologi pertanian oleh sebagian petani. Temuan ini sejalan dengan teori Edward III (2019) yang menyatakan bahwa komunikasi yang jelas dan konsisten adalah syarat mutlak implementasi kebijakan. Penelitian ini juga sejalan dengan temuan Jariyah (2023) bahwa kurangnya partisipasi petani menghambat efektivitas penyampaian informasi kebijakan. Perlunya strategi komunikasi yang lebih adaptif, seperti penyesuaian jadwal

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

dengan aktivitas petani atau penggunaan media sederhana, menjadi rekomendasi penting. Peningkatan frekuensi komunikasi dua arah dapat menjembatani kesenjangan pemahaman antara penyuluh dan petani. Dengan demikian, indikator kesesuaian informasi di BPP Tebing Tinggi masih memerlukan perbaikan signifikan untuk mencapai implementasi yang optimal.

b. Intensitas Pertemuan antara Penyuluh dan Petani

Hasil penelitian menemukan bahwa intensitas pertemuan antara penyuluh dan kelompok tani di BPP Tebing Tinggi telah berlangsung secara rutin, terutama pada masa tanam dan panen. Jadwal pertemuan biasanya dilakukan satu hingga dua kali dalam sebulan, namun frekuensinya meningkat saat terjadi masalah hama atau penyakit. Penyuluh juga melakukan kunjungan darurat ke lahan petani ketika terdapat laporan kendala teknis di lapangan. Realisasi pertemuan seringkali terkendala oleh faktor cuaca buruk dan aktivitas pertanian yang padat. Meskipun jadwal telah ditentukan, kehadiran petani dalam pertemuan belum mencapai target yang diharapkan. Luas wilayah binaan yang besar membatasi mobilitas penyuluh dalam melakukan kunjungan rutin ke setiap desa.

Intensitas pertemuan yang belum optimal menyebabkan proses pendampingan berjalan tidak berkesinambungan bagi sebagian kelompok tani. Edward III (2019) menekankan bahwa komunikasi berkelanjutan merupakan pilar utama keberhasilan implementasi program publik. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayat (2024) bahwa kurangnya intensitas kegiatan di desa tertentu menjadi penghambat serius bagi efektivitas penyuluhan. Penerapan sistem penjadwalan yang lebih fleksibel dengan mempertimbangkan kalender pertanian lokal dan pembentukan sub-wilayah binaan untuk memudahkan penyuluh menjangkau petani di daerah terpencil menjadi rekomendasi penting. Peningkatan intensitas pertemuan mutlak diperlukan agar pesan program dapat terserap secara maksimal oleh seluruh petani sasaran.

c. Penggunaan Media

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penggunaan media dalam kegiatan penyuluhan di BPP Tebing Tinggi telah memanfaatkan berbagai saluran, seperti tatap muka, grup WhatsApp, brosur, dan demonstrasi lapangan. Media komunikasi langsung masih menjadi andalan utama karena dianggap paling mudah dipahami oleh petani. Pemanfaatan teknologi digital seperti WhatsApp cukup membantu dalam menyebarkan informasi singkat dan pengumuman kegiatan. Lahan demonstrasi (*demplot*) menjadi media praktis yang efektif untuk menunjukkan penerapan teknologi secara nyata. Variasi media yang digunakan sudah cukup beragam, namun ketersediaan alat peraga pendukung masih terbatas. Sebagian petani di wilayah terpencil belum terakses oleh media digital karena keterbatasan jaringan internet.

Keterbatasan sarana fisik dan digital menyebabkan proses transfer pengetahuan masih belum berjalan maksimal di semua kelompok. Edward III (2019) menyatakan bahwa sumber daya komunikasi yang memadai sangat menentukan efektivitas penyebaran informasi kebijakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan Marlinah dan Yuliana (2022) bahwa kemampuan memanfaatkan media belajar sangat mempengaruhi keberhasilan penyuluh dalam mendidik petani. Pengadaan alat peraga interaktif dan penguatan infrastruktur digital di wilayah binaan, serta pelatihan bagi penyuluh untuk

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengoptimalkan penggunaan media teknologi informasi menjadi agenda prioritas untuk mencapai tujuan program secara efektif.

**2. Sumber Daya**

a. Jumlah dan Kompetensi Penyuluh Pertanian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi teknis penyuluh pertanian di BPP Tebing Tinggi dinilai cukup baik oleh para petani dan ketua kelompok tani. Penyuluh memiliki kemampuan memadai dalam memberikan arahan budidaya, penanganan hama, serta aplikasi pupuk yang tepat. Mayoritas penyuluh telah mengikuti berbagai pelatihan dan pembinaan rutin yang menunjang tugas mereka. Namun, jumlah penyuluh yang bertugas saat ini sangat tidak sebanding dengan luasnya wilayah kecamatan dan jumlah kelompok tani binaan. Rasio penyuluh-petani yang timpang mengakibatkan beban kerja penyuluh menjadi sangat berat. Satu penyuluh seringkali harus menangani beberapa desa sekaligus, sehingga waktu pendampingan terbagi tipis.

Ketimpangan antara jumlah penyuluh dan luas wilayah binaan merupakan hambatan struktural terbesar dalam implementasi program ini. Edward III (2019) menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang cukup adalah prasyarat mutlak implementasi kebijakan. Temuan ini memperkuat hasil penelitian Hidayat (2024) yang menyebut keterbatasan jumlah penyuluh sebagai penyebab utama ketidakmerataan informasi. Penambahan kuota penyuluh PNS atau pemanfaatan penyuluh swadaya untuk membantu tugas lapangan, serta program rotasi dan pembagian zona binaan yang lebih proporsional untuk mengoptimalkan tenaga yang ada menjadi rekomendasi penting. Peningkatan jumlah penyuluh harus diimbangi dengan penguatan kompetensi melalui pelatihan berkala.

d. Fasilitas Pendukung

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa fasilitas pendukung seperti alat peraga dan lahan demonstrasi telah tersedia dan cukup membantu proses pembelajaran petani di BPP Tebing Tinggi. Keberadaan lahan demplot sangat diakui manfaatnya oleh petani dalam memahami praktik langsung teknologi pertanian. Namun, meskipun ada beberapa fasilitas, kuantitas dan variasinya masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan riil di lapangan. Sarana transportasi operasional bagi penyuluh menjadi keluhan utama karena menghambat mobilitas ke wilayah terpencil. Minimnya kendaraan dinas memaksa penyuluh mengandalkan kendaraan pribadi atau transportasi umum yang tidak selalu tersedia. Kurangnya media informasi modern membuat penyuluhan kurang menarik bagi generasi petani muda .

Kekurangan sarana prasarana secara signifikan menurunkan efektivitas dan jangkauan kegiatan penyuluhan di lapangan. Edward III (2019) menyatakan bahwa infrastruktur dan peralatan yang memadai adalah komponen vital dari sumber daya kebijakan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Jariyah (2023) bahwa minimnya fasilitas pendukung menjadi salah satu kendala utama penyuluhan pertanian. Penganggaran khusus untuk pengadaan sarana transportasi, alat peraga modern, dan perlengkapan digital, serta perawatan rutin dan pembaruan fasilitas agar tetap relevan dengan kebutuhan petani menjadi prioritas untuk menjamin kelancaran program di masa depan.

**3. Disposisi**

a. Pemahaman Penyuluh terhadap Program

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum penyuluh pertanian di BPP Tebing Tinggi memiliki pemahaman yang cukup baik terhadap substansi program penyuluhan yang diamanatkan. Penyuluh mampu menjelaskan tujuan dan mekanisme pelaksanaan program kepada kelompok tani dengan bahasa yang sederhana. Koordinasi dan pembinaan rutin sebelum pelaksanaan program membantu meningkatkan wawasan penyuluh tentang kebijakan terbaru. Sebagian besar penyuluh memahami tugas pokok dan fungsi mereka sebagai fasilitator dan edukator pertanian. Namun, masih ada sebagian kecil penyuluh yang menjalankan kegiatan secara prosedural tanpa menghayati tujuan strategis program. Pemahaman terhadap metode partisipatif masih lemah di kalangan beberapa penyuluh senior.

Meskipun pemahaman dasar penyuluh sudah baik, kedalaman pemahaman terhadap filosofi pemberdayaan petani masih perlu ditingkatkan. Edward III (2019) menekankan bahwa disposisi atau sikap pelaksana sangat bergantung pada pemahaman mereka terhadap esensi kebijakan. Pendekatan top-down masih dominan, berbeda dengan idealisme undang-undang yang menginginkan partisipasi aktif petani. Pelatihan intensif berorientasi pada pembentukan sikap (*attitude*) dan nilai-nilai pemberdayaan bagi penyuluh, serta evaluasi berkala untuk memastikan penyuluh tidak hanya bekerja rutin namun mencapai dampak transformatif menjadi kunci untuk mengubah pola penyuluhan menjadi lebih demokratis dan responsif.

e. Penyuluh Mampu Merespon Kebutuhan Petani

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penyuluh di BPP Tebing Tinggi dinilai cukup responsif dalam menangani masalah-masalah teknis yang dihadapi petani sehari-hari. Penyuluh cepat turun ke lapangan ketika menerima laporan serangan hama atau penyakit tanaman. Komunikasi personal yang baik membuat petani merasa nyaman untuk berkonsultasi tentang berbagai kendala pertanian. Penyuluh berusaha memberikan solusi praktis yang sesuai dengan kondisi dan kemampuan ekonomi petani setempat. Namun, keterbatasan waktu dan jarak seringkali menghambat respons cepat, terutama untuk wilayah binaan yang jauh dari kantor BPP. Petani masih mengharapkan pendampingan yang lebih intensif dan berkelanjutan dari para penyuluh.

Kapasitas responsif penyuluh sudah tergolong baik, namun belum optimal karena kendala struktural dan geografis. Edward III (2019) menyatakan bahwa disposisi pelaksana mencakup komitmen dan kesungguhan, yang tercermin dari responsivitas mereka. Temuan ini sejalan dengan penelitian Marlinah dan Yuliana (2022) yang menyebut kemampuan pembinaan dan respons terhadap kebutuhan petani adalah indikator kinerja utama penyuluh. Pembentukan sistem informasi keluhan cepat yang memudahkan petani melapor dan penyuluh merespons secara terstruktur, serta penambahan jumlah penyuluh agar setiap desa mendapatkan porsi pendampingan yang memadai menjadi rekomendasi penting. Responsivitas yang tinggi akan membangun kepercayaan publik dan meningkatkan partisipasi petani dalam program.

**4. Struktur Birokrasi**

a. Adanya Monitoring dan Penilaian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan monitoring dan penilaian terhadap pelaksanaan program penyuluhan di BPP Tebing Tinggi telah berlangsung secara periodik. Monitoring dilakukan melalui laporan kegiatan tertulis dari penyuluh dan kunjungan supervisi langsung ke lapangan. Mekanisme evaluasi rutin ini membantu

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

mengidentifikasi hambatan teknis dan administrasi yang terjadi selama pelaksanaan program. Namun, penilaian kinerja penyuluh masih berfokus pada aspek administratif dan kehadiran, belum sepenuhnya mengukur dampak di tingkat petani. Pelaksanaan monitoring belum merata menjangkau seluruh kelompok tani karena keterbatasan waktu dan tenaga supervisor. Koordinasi antara BPP dengan dinas terkait dalam evaluasi program masih lemah.

Pelaksanaan monitoring dan penilaian belum optimal karena masih adanya prosedur administrasi yang berbelit dan koordinasi antar lembaga yang kurang solid. Edward III (2019) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang kompleks dapat menghambat implementasi kebijakan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpang tindih tugas antar instansi menghambat efektivitas pengawasan program. Penyederhanaan prosedur administrasi dan penguatan tim monitoring terintegrasi antara BPP, Dinas Pertanian, dan pemerintah kecamatan, serta indikator penilaian yang berbasis hasil (*outcome*) di lapangan bukan hanya output kegiatan akan meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas program secara keseluruhan.

b. Kejelasan Pedoman Pelaksanaan Penyuluhan

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pedoman dan aturan pelaksanaan program penyuluhan di BPP Tebing Tinggi dinilai sudah cukup jelas dan terstruktur. Setiap kegiatan memiliki petunjuk teknis (juknis) yang menjadi acuan bagi penyuluh dalam melaksanakan tugas di lapangan. Penyuluh secara rutin mensosialisasikan aturan-aturan program kepada kelompok tani agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan. Kejelasan pedoman membantu mengurangi kebingungan dan penyimpangan prosedur selama kegiatan berlangsung. Namun, meskipun pedoman sudah jelas, implementasinya di lapangan seringkali menghadapi kendala karena kondisi riil yang berbeda dengan aturan baku. Masih ada tumpang tindih interpretasi pedoman antara instansi terkait.

Kejelasan pedoman belum sepenuhnya menjamin kelancaran pelaksanaan karena faktor koordinasi dan penyesuaian lapangan. Edward III (2019) menyatakan bahwa struktur birokrasi yang efektif memerlukan kejelasan peran dan standar operasional prosedur yang fleksibel. Prosedur administrasi yang rumit menghambat kinerja birokrasi di tingkat lokal. Penyusunan pedoman yang lebih aplikatif dan responsif terhadap kondisi geografis serta sosial budaya petani setempat, serta sosialisasi pedoman secara berkala kepada seluruh pemangku kepentingan untuk menyamakan persepsi akan meningkatkan efektivitas implementasi program penyuluhan di lapangan.

**Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Program**

Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di BPP Tebing Tinggi ditopang oleh sinergi antara modal sosial dan dukungan institusional yang membentuk fondasi keberhasilan program. Kerja sama erat antara penyuluh dan kelompok tani terwujud melalui komunikasi dua arah yang terbuka, memungkinkan pertukaran informasi dan solusi masalah pertanian secara responsif. Antusiasme petani dalam mengikuti demonstrasi lahan, yang diperkuat oleh keberadaan lahan praktik (demplot), menjadi wahana efektif transfer teknologi karena meningkatkan pemahaman petani terhadap inovasi secara langsung (Soetomo, 2019). Dukungan pemerintah daerah melalui kebijakan dan bantuan teknis turut menumbuhkan semangat kolektif, memperkuat komitmen penyuluh sekaligus partisipasi aktif petani. Sinergi ini sejalan dengan perspektif pemberdayaan masyarakat yang menekankan kemitraan setara antara fasilitator dan sasaran program, di mana rasa saling percaya dan tujuan bersama menjadi pendorong utama (Soetomo, 2019). Dengan

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

demikian, interaksi positif antara komitmen penyuluh, partisipasi kelompok tani, dan keberpihakan kebijakan publik menciptakan lingkungan implementasi yang kondusif bagi pencapaian tujuan penyuluhan.

Efektivitas implementasi program terhambat oleh kombinasi hambatan struktural, operasional, dan kultural yang saling memperburuk (Penelitian, 2026). Secara struktural, keterbatasan jumlah penyuluh tidak sebanding dengan luas wilayah binaan, sementara minimnya sarana transportasi dan alat peraga membatasi mobilitas serta kualitas penyuluhan di daerah terpencil (Edward III, 2019). Kondisi ini diperparah oleh faktor operasional seperti cuaca ekstrem dan akses jalan buruk yang sering menunda atau membatalkan jadwal pertemuan. Pada tataran kultural, rendahnya partisipasi sebagian petani akibat kesibukan mengolah lahan dan minimnya kesadaran akan manfaat jangka panjang penyuluhan mengurangi jangkauan program, sementara rumitnya koordinasi antarinstansi birokrasi menimbulkan hambatan administratif di lapangan. Berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III (2019), kegagalan dalam mengelola sumber daya secara memadai dan gangguan pada saluran komunikasi akan berdampak langsung terhadap penurunan kinerja implementasi. Temuan ini memberikan implikasi teoritis bahwa dalam konteks penyuluhan pertanian, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada modal sosial dan partisipasi, tetapi juga sangat ditentukan oleh kecukupan sumber daya struktural serta kejelasan dan kecepatan koordinasi birokrasi, sehingga analisis efektivitas harus menempatkan interdependensi antara faktor teknis, administratif, dan perilaku sebagai variabel penentu (Nugroho, 2021).

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi program penyuluhan pertanian di BPP Tebing Tinggi Kabupaten Balangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penyuluhan pertanian secara keseluruhan belum optimal. Dari empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III (2019) yang dianalisis, aspek komunikasi dan sumber daya masih belum optimal, sedangkan aspek disposisi dan struktur birokrasi sudah cukup baik namun masih memerlukan peningkatan.

Pada aspek komunikasi, penyampaian informasi, kegiatan penyuluhan, dan komunikasi antara penyuluh dan kelompok tani telah dilakukan melalui berbagai media, namun masih terdapat kendala seperti keterlambatan informasi, kurangnya intensitas sosialisasi, dan partisipasi petani yang belum maksimal. Pada aspek sumber daya, kompetensi penyuluh sudah cukup baik dalam memberikan arahan dan pendampingan, tetapi jumlah penyuluh masih terbatas dan sarana prasarana pendukung belum memadai. Pada aspek disposisi, penyuluh dinilai cukup memahami program dan responsif terhadap kebutuhan petani, namun masih ada penyuluh yang belum sepenuhnya memahami substansi kebijakan dan menerapkan metode penyuluhan yang masih bersifat satu arah. Pada aspek struktur birokrasi, monitoring, evaluasi, dan pedoman pelaksanaan sudah cukup baik, tetapi koordinasi antar lembaga masih perlu ditingkatkan.

Faktor pendukung implementasi program penyuluhan pertanian meliputi kerja sama antara penyuluh dan kelompok tani, komunikasi yang cukup baik, dukungan pemerintah daerah, pendampingan lapangan, dan lahan demonstrasi. Faktor penghambat meliputi keterbatasan jumlah penyuluh, sarana dan prasarana yang belum memadai, kondisi cuaca dan geografis, rendahnya partisipasi petani, dan koordinasi antar lembaga yang belum maksimal.

Esensi temuan penelitian ini adalah bahwa implementasi program penyuluhan pertanian memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, yang tidak hanya berfokus pada aspek

ISSN : 2685-8541
Vol. 8, No. 1, 2026
DOI :10.36658/aliidarabalad

teknis penyuluhan tetapi juga pada penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan sarana prasarana, dan pemberdayaan petani sebagai subjek pembangunan (Soetomo, 2019; Nugroho, 2021). Keberhasilan implementasi program penyuluhan pertanian sangat bergantung pada sinergi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, penyuluh, kelompok tani, dan masyarakat petani (Subarsono, 2019). Tanpa adanya komitmen dan kerja sama yang kuat dari seluruh pihak, program penyuluhan pertanian akan sulit mencapai tujuannya dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani (Winarno, 2018).

## DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2017) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
Anggara, S. (2019) *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia.
Badan Pusat Statistik Kabupaten Balangan (2025) 'Kecamatan Tebing Tinggi Dalam Angka 2025'.
Hidayat, R. (2024) 'Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Juai Kabupaten Balangan'. Amuntai.
III, G.C.E. (2019) *Implementing Public Policy*. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.
Jariyah, H. (2023) 'Implementasi Program Penyuluhan Pertanian di Kecamatan Banjang Kabupaten Hulu Sungai Utara'. Amuntai.
Marlinah, S. and Yuliana, R. (2022) 'Analisis Efektivitas Peran Penyuluh Pertanian terhadap Petani', *Jurnal Pertanian Tropik*, 9(1), pp. 45–52.
Miles, M.B., Huberman, A.M. and Saldaña, J. (2014) *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. 3rd edn. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Nugroho, R. (2021) *Kebijakan Publik: Implementasi dan Pengendalian Kebijakan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
Pasolong, H. (2019) *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
Soetomo (2019) *Pemberdayaan Masyarakat: Membangun Masyarakat, Memberdayakan Rakyat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Subarsono, A.G. (2019) *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
Sugiyono (2019) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R\&D*. Bandung: Alfabeta.
Winarno, B. (2018) *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing Service).
Yoyon (2022) 'Sistem Penyuluhan Pertanian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006', *Jurnal Kebijakan Pertanian*, 7(2), pp. 112–128.